

**MUI PAPUA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN
JAYAPURA, 1993-2010 M.**



TESIS

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Humaniora (M.Hum)

Oleh:

Luqman Al Hakim
NIM: 20201022003

**PROGRAM MAGISTER STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN IMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Luqman Al Hakim
NIM : 20201022003
Program Studi : Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “MUI Papua dan Peranannya Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jayapura, 1993-2010 M” secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi, kecuali kalimat-kalimat kutipan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Saya menyatakan


76F13AJX283172096
Luqman Al Hakim
20201022003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2280/Un.02/DA/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : MUI PAPUA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN JAYAPURA 1993 - 2010 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMAN AL HAKIM, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 20201022003
Telah diujikan pada : Rabu, 09 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
SIGNED

Valid ID: 6386f0857da2e



Penguji I

Dr. Badrun, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 638447cfce00e



Penguji II

Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63897c4c0fbd8



Yogyakarta, 09 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 638da66e0d191

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah tesis berjudul:

MUI PAPUA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN JAYAPURA, 1993-2010 M.

Yang ditulis oleh:

Nama : Luqman Al Hakim
NIM : 20201022003
Program Studi : Magister Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat serta layak diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum).
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menganalisis kontribusi MUI Papua dalam membina dan menyebarkan kerukunan agama di Jayapura tahun 1993-2010. Diasumsikan bahwa MUI Papua sebagai pusat penggerak kerukunan umat beragama di Jayapura telah memberikan perubahan dalam sosial-keagamaan masyarakat Jayapura. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kehidupan dan perkembangan keagamaan di Kabupaten Jayapura pra dan pasca konflik 1998? bagaimana perkembangan dan aktivitas MUI Papua di Jayapura? dan mengapa peranan kerukunan umat beragama MUI Papua menimbulkan perubahan dalam sosial keagamaan di Jayapura?

Penelitian sejarah sosial-keagamaan kontemporer ini menggunakan pendekatan sosiologi. Adapun konsep serta teori yang dijadikan acuan adalah *agama, nilai norma dan budaya*. Menurut Clifford Geertz, agama sebagai Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep-konsep tersebut dengan pancaran faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realitas, sedangkan nilai norma dan budaya menurut Franz Magnis Suseno dipengaruhi oleh dua kaidah dasar yang berkaitan dengan pola pergaulan dan hubungan sosial dalam masyarakat sehingga menciptakan kerukunan dan keselarasan, adapun dua kaidah tersebut, yaitu: *Pertama*, Bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan konflik biasa juga disebut dengan kaidah kerukunan. *Kedua*, menuntut agar manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya yang disebut dengan prinsip hormat. Prosedur penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dalam empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Penelitian ini menyimpulkan: 1. Kehidupan pra konflik 1998 di Jayapura masyarakat toleran, tidak adanya sentimen agama dan munculnya simbol-simbol agama Kristen di Jayapura. Toleransi antar masyarakat tercipta baik sesama masyarakat Papua dan pendatang. Sedangkan pasca 1998 kondisi masyarakat masih terjadi trauma dalam bidang sosial dan agama, muncul kalangan yang menolak munculnya simbol-simbol Islam seperti hijab, bank syari'ah, STAIN dan lainnya. 2. Sepanjang 1998-2010 MUI Papua telah melakukan kerjasama baik pada internal muslim dan non muslim. MUI Papua turut melakukan training kerukunan beragama dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Jayapura dan pengurus masjid-masjid yang ada di Kabupaten Jayapura. 3. Secara garis besar terdapat dua faktor yang membentuk perubahan tersebut yaitu: sosial dan agama. Kondisi sosial Jayapura yang beragam membentuk sikap masyarakat Jayapura menjadikan toleran terhadap perbedaan. Selain faktor sosial agama turut menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Jayapura. Adapun sikap yang muncul seperti persaudaraan yang tulus, dan munculnya nota integritas zona kerukunan umat beragama di Jayapura.

Kata Kunci: *MUI Papua, Kerukunan Umat Beragama, Perubahan Sosial-keagamaan.*

ABSTRACT

This study seeks to analyze the contribution of the MUI Papua in fostering and spreading religious harmony in Jayapura in 1993-2010. It is assumed that the MUI Papua as the driving force for religious harmony in Jayapura has made changes in the socio-religious people of Jayapura. The main issues in this study are: How was life and religious development in Jayapura Regency before and after the 1998 conflict? How are the developments and activities of the Papuan MUI in Jayapura? and why does the role of religious harmony in the Papuan MUI lead to changes in social and religious life in Jayapura?

This contemporary socio-religious history research uses a sociological approach. The concepts and theories used as references are religion, values, norms and culture. According to Clifford Geertz, religion as a system of symbols which acts to set strong, pervasive and long-lasting moods and motivations in human beings by formulating concepts regarding a general order of existence and clothing these concepts with radiance of factuality so that the mood and those motivations seem real, while the norms and cultural values according to Franz Magnis Suseno are influenced by two basic rules related to patterns of association and social relations in society so as to create harmony and harmony, as for these two rules, namely: First, That in every situation humans should behave in such a way that causing conflict is also known as the rule of harmony. Second, it demands that humans, in speaking and carrying themselves, always show respect for others, according to their degree and position, which is called the principle of respect. The research procedure uses historical methods which are carried out in four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

This study concludes: 1. Life before the 1998 conflict in Jayapura was a tolerant society, there was no religious sentiment and the emergence of symbols of Christianity in Jayapura. Tolerance between communities is created both among Papuans and immigrants. Whereas after 1998 the condition of society was still traumatized in the social and religious fields, there were groups who rejected the appearance of Islamic symbols such as the hijab, Islamic banking, STAIN and others. 2. Throughout 1998-2010 the MUI Papua has collaborated both internally with Muslims and non-Muslims. MUI Papua also conducted training on religious harmony involving the Jayapura Regency government and administrators of mosques in Jayapura Regency. 3. Broadly speaking, there are two factors that shape these changes, namely: social and religious. The diverse social conditions of Jayapura shape the attitude of the people of Jayapura, making them tolerant of differences. Apart from the social factor, religion also brought about changes in the life of the people of Jayapura. As for the attitudes that emerged, such as sincere brotherhood, and the emergence of a memorandum of integrity for religious harmony zones in Jayapura.

Key Words: MUI Papua, Religious Harmony, Socio-Religious Change.

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”

(Q.S. Ali ‘Imran, 159)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada; Bapak, Ibu, keluarga, dan dosen pembimbing *research* pertama peneliti semasa di IAIN Jember.

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya kepada peneliti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta. Shalawat dan salam selalu tertuju kepada sosok pemberi jalan bagi seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak dapat berjumpa dan mendapatkan syafa'atnya.

Tesis berjudul “MUI Papua dan Moderasi Beragama di Kabupaten Jayapura 1980-2010” telah usai ditulis. Tesis ini ditulis untuk mengetahui dinamika MUI Papua di Kabupaten Jayapura, dan toleransi di Kabupaten Jayapura. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang memudahkan penulis untuk merampungkan tesis ini tanpa campur tangan Allah semua usaha yang telah dilakukan penulis tidak akan berhasil.

Penulis hendak menyampaikan terimakasih yang banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini. Seluruh uraian yang penulis sajikan tidak bisa tersusun secara paripurna tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Wildan M.A. selaku dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Syamsul Arifin M.Ag. selaku Dosen Pensehat Akademik, dan Kaprodi S2 SKI UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam urusan akademik dan masukan penelitian.

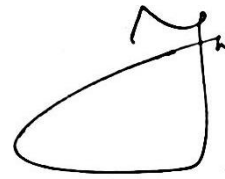
3. Bapak Ibnu Su'ud dan Ibu Supriyati selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya.
4. Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum. selaku pembimbing dalam tesis ini. Terimakasih telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, masukan, dan saran agar tulisan ini menjadi lebih baik.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Magister SPI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmunya.
6. Bapak ketua MUI Jayapura, dan Sekertaris Umum MUI Papua yang telah memberikan banyak informasi dan data penelitian ini.
7. Bapak Kabiro AUK, dan AAKK UIN Sunan Kalijaga; Dr. H. Abd Syakur, S.Ag, M.Si, dan Dr. H. Mamat Rahmatullah, M.M. yang memberikan banyak nasehat, motivasi, dan dorongan untuk terus maju kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
8. Dr. H. Sukarno, M.Si, selaku ayah asuh kami di Masjid At-Taqwa PKM Mangli yang telah memberikan dorongan pada kami untuk lebih berbenah dan memberikan semangat selama kami menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Teman-teman prodi Magister Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

Penulis juga berharap semakin banyak penelitian-penelitian yang mengangkat kajian Islam di Papua dan di Indonesia Timur. Semoga tesis ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat dalam ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sejarah Islam. atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, amin.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a small mark at the top right.

Lugman Al Hakim
NIM: 20201022003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Landasan Teori.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : PERKEMBANGAN SOSIAL-KEAGAMAAN DI JAYAPURA AKHIR ABAD XX	22
A. Pemeluk Agama-agama di Jayapura	22
B. Hubungan Antar Umat Beragama.....	28
C. Relasi Pemerintah dan Pemeluk Agama-agama	33
BAB III: MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI JAYAPURA.....	44

A. Dinamika Organisasi MUI Papua di Jayapura	44
B. Pembentukan MUI Cabang Jayapura.....	51
C. Hubungan Sosial MUI, Pemerintah, dan Masyarakat.....	53
BAB IV : PERANAN MUI PAPUA DALAM MENGELOLA KERUKUNAN	
UMAT BERAGAMA.....	59
A. Fasilitator Rekonsiliasi Konflik Keagamaan	59
B. Pengembang FKUB	65
C. Mediator Kehidupan Keagamaan.....	72
D. Implikasi Kerukunan Umat Beragama MUI Terhadap Perubahan Sosial-Keagamaan.....	79
BAB V: PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Papua masuk menjadi wilayah Indonesia setelah dikeluarkan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969.¹ Pasca Papua bergabung menjadi provinsi Indonesia 1969 hingga kini benih konflik dan persinggungan masih terjadi. Adapun di Jayapura pada tahun 2010 telah terjadi puncak stabilitas yang mulai tertata sejak 2006. Perselisihan yang terjadi di Papua melibatkan berbagai pihak baik dari kalangan asli Papua maupun pendatang. Sentimen dan konflik tersebut pertama kali muncul pada tahun 1980 saat pemerintahan Orde Baru mengirimkan orang transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan beragama Islam.²

Secara garis besar masyarakat asli Papua mengelompokkan dirinya menjadi dua yaitu: pesisir dan pegunungan.³ Kedatangan masyarakat transmigran di Jayapura telah memperluas kesenjangan ekonomi antara putra daerah (orang asli Papua) dan pendatang, sehingga menghasilkan golongan mampu dan tidak mampu, dalam lingkungan masyarakat Papua

¹ Iva Rachmawati, *Papua Simpul Jamrud Khatulistiwa* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 28.

² Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua Perang Rahasia Trauma dan Sparatisme* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 97.

³ Masyarakat pegunungan dan pesisir merupakan masyarakat asli Papua yang berasal dari orang Melanisoid. Antara masyarakat pegunungan dan pesisir sering terjadi konflik, alasan mendasar konflik tersebut disebabkan umumnya masyarakat pesisir sudah tidak ingin mengikuti gerakan KKB sedangkan masyarakat pegunungan mayoritas masih bersemangat untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga sering kali terjadi pertarungan baik intelektual maupun fisik dalam lingkungan mereka. Hal pokok yang mendasari masyarakat pesisir untuk menolak gerakan sparatisme Papua ialah mereka telah berbaur dengan suku pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, Manado, Ambon, dan Madura.

asli terjadi pengelompokan yang dilandasi politik dengan sebutan kaum pro KKB yakni “Merah Sekali” (MS)⁴, dan pro Indonesia “Biru Sekali” (BS).⁵

Kedatangan masyarakat transmigran pada 1980 di Papua, telah meningkatkan kebencian orang asli Papua. Sering kali terjadi kasus penyanderaan warga transmigran oleh OPM (kini KKB). Mereka yang diculik di bawa ke Papua New Guinea (PNG), sehingga pemerintah Indonesia sulit mengusut kasus tersebut. Situasi tersebut memuncak hingga meletusnya reformasi pada tahun 1998.⁶

Tercatat dalam Repelita (rencana pembangunan lima tahun) 1, II dan III antara tahun 1969-1984 pemerintah Indonesia telah menempatkan 41.701 transmigran ke Papua. Dalam Repelita IV tahun 1984-1989 angka transmigran tersebut meningkat menjadi 137.800 KK. Untuk menghadapi gelombang transmigrasi besar pemerintah membuka lahan 689.000 ha, sehingga muncul istilah meng-Indonesiakan Papua di kalangan orang asli Papua. Momen 1998 menjadi tonggak reformasi besar di Papua khususnya di Jayapura. Pada tahun tersebut orang Papua pro-OPM (KKB) yang dikomandoi Theys Hiyo Elluay melakukan demonstrasi menuntut adanya referendum Papua.⁷

⁴ Kelompok MS memiliki turunan kelompok warga dari OPM/KKB, TPN (Tentara Pembebasan Nasional), PDP (Presidium Dewan Papua) dan kelompok lainnya. Sedangkan kelompok BS memiliki turunan kelompok warga dari TNI, Polri, Milisi Laskar Jihad, dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

⁵ Idrus Al Hamid, “Islam Politik Di Papua: Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian” (*Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, 2013), hlm. 442,

⁶ Tempo.co, “Kasus Penyanderaan WNI di Papua Terjadi Sejak 1980-an”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/700894/kasus-penyanderaan-wni-di-papua-terjadi-sejak-1980-an>, diakses pada 17 Juni 2022.

⁷ Indira Ardanareswari, “Sejarah Transmigrasi Orang Jawa Ke Papua”, <https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs>, diakses pada 17 Juni 2022.

Pada tahun 2001 terjadi pembunuhan Theys Hiyo Eluay, sehingga meningkatkan kemarahan orang Papua. Theys merupakan ketua adat (*ondo api*) yang sangat disegani di Jayapura. Pembunuhan tersebut telah membakar semangat masyarakat Papua pegunungan yang berada di Jayapura untuk meneguhkan ke-papua-an mereka. Menurut Kivimaki dan Thorning konflik Papua dapat direpresentasikan antara kelompok pro-NKRI dan pro-Papua Merdeka,⁸ ditengah konflik sosial yang terjadi pada 1998 MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Papua berperan dalam menenangkan masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian demi terwujudnya Jayapura yang damai.

Konstelasi sosial politik yang diwarnai gejolak sosial politik telah menuntut ditegakkannya hak-hak dasar masyarakat Papua. Kontestasi dalam ranah tersebut juga didukung dengan terbitnya OTSUS (Otonomi Khusus) pada tahun 2001 telah menuai gejolak sosial di Jayapura, sehingga semakin meningkat barometer identitas kelompok, dan sentimen antar agama. Sepanjang tahun 1998 hingga 2001 telah terjadi serentetan konflik seperti demo meminta referendum, demo kematian Theys Elluay, kekerasan agama dan kelas pendatang yang berasal dari Bugis, Minahasa, Jawa, Madura, NTB dan suku lainnya, yang notabane mayoritas Islam di Kabupaten Jayapura.⁹

⁸ Cahyo Pamungkas, "Muslim Papua Dan Muslim Pendatang Pertarungan Identitas Antara Ke-Indonesiaan-an dan Ke-Papua-an", *Jurnal Kawistara*, Vol. 6, No. 3, 2016, hlm. 250.

⁹ Toni Victor M Wanggai, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 203.

MUI Provinsi Papua berperanan dalam menenangkan Umat Islam di Jayapura, sebab Jayapura merupakan salah satu basis Muslim di Papua selain Kabupaten Fak-fak. Dalam mengelola kerukunan di Jayapura MUI Papua yang diwakili H Zubeir D Husein (Ketua MUI Papua) bekerja sama¹⁰ dengan Pendeta Herman Saud (Ketua Sinode GKI di Tanah Papua), Uskup Leo L Ladjar OFM (Uskup Jayapura), Pandita Arya Bodho Jasmani (Sekertari Majelis Budhayana), dan Drs. I Nyoman Sudha (Ketua Parisada Hindu Dharma).¹¹

UU OTSUS 2001 lahir pasca dilaksanakan Kongres Papua tahun 2000. OTSUS tersebut umat Islam di Jayapura memperoleh kesempatan emas sebab sejatinya OTSUS lahir untuk meredam aksi separatisme dan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Terkait OTSUS tersebut, MUI Papua lebih aktif dalam mengembangkan dakwah dan sosialisasi nilai-nilai Islam dan kebhinekaan di Jayapura baik administrasi, ekonomi, dan politik sehingga Jayapura menjadi magnet tersendiri bagi kalangan muslim dan MUI. Akan tetapi pasca OTSUS terjadi peningkatan diskriminasi dari

¹⁰ Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah keputusan, antara lain; *Pertama*, Masyarakat menggunakan hati nurani dan akal sehat untuk menilai isu dan kabar burung yang tersebar diantara kita. *Kedua*, Kami mengingatkan pada semua pihak agar menyadari kembali bahwa perbedaan ras, agama, dan warna kulit, struktur tubuh datangnya dari sang pencipta, perbedaan tersebut harus kita syukuri dan kami menentang segala upaya pihak manapun yang menyalahkan anugerah Ilahi untuk kepentingan politik tertentu. *Ketiga*, Kami menyerukan pada pemerintah pusat untuk secara serius segera dan sistematis mengambil langkah-langkah untuk melindungi jati diri dan hak hidup masyarakat Papua sesama anak bangsa seperti antara lain yang dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS (Otonomi Khusus).

¹¹ Toni Victor. M Wanggai, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua*, hlm. 206.

kalangan penduduk Papua Pegunungan kepada Papua Pantai, muslim, dan pendatang.

Berdiri DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan MRP (Majelis Rakyat Papua) menjadi simbol hegemoni orang asli Papua Pegunungan terhadap pendatang. Dalam konteks lainnya kaum muslim asli Papua nasibnya tidak berbeda dengan pendatang. Hak muslim penduduk asli Papua dikurangi dan disejajarkan dengan pendatang. OTSUS juga menjadi landasan HAM bagi kalangan asli Papua Pegunungan, yang pelaksanaannya lebih menguntungkan putra daerah daripada pendatang di Kabupaten Jayapura.¹²

Di tengah situasi sosial tersebut, MUI Papua terus melakukan upaya-upaya moderasi beragama bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah Jayapura. Dua ormas ini memiliki nilai kekuatan dan menjadi pemersatu dalam silaturahmi muslim di Jayapura, sehingga terciptalah solidaritas muslim tanpa memandang perbedaan organisasi. Selain itu, MUI Papua juga bekerja sama dengan STAI Al-Fattah yang telah berdiri sejak 1989, dan MUI Papua mendukung alih status menjadi STAIN¹³ pada 2006. STAIN Al-Fattah selanjutnya menjadi simbol pengembangan Islam di tanah Papua.¹⁴

¹² Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua Perang Rahasia Trauma dan Sparatisme*, hlm. 108.

¹³ Rencana pendirian STAIN Al-Fattah ditolak pada tahun 2005 oleh masyarakat sebab diklaim sebagai “Islamic Center” walaupun mereka memahami STAIN merupakan lembaga pendidikan. pernyataan penolakan STAIN Al-Fattah dinyatakan dengan tegas oleh asosiasi Pendeta Indonesia Papua mereka melarang penjualan tanah adat untuk kepentingan pembangunan STAIN Al-Fattah.

¹⁴ Idrus Al Hamid, *Jalan Panjang Perdamaian Papua Memahami Sejarah dan Peradaban* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2015), hlm. 95.

Pasca 2006 MUI Papua bersama FKUB sering bekerja sama dalam menjalankan kegiatan dialog antar agama. Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk memahami permasalahan dalam pengembangan kegiatan kerukunan antar agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok kemudian dikonsultasikan kepada seluruh tokoh masyarakat di Jayapura, dalam beberapa kesempatan MUI Papua dan FKUB juga melibatkan pemuda dan akademisi Jayapura.¹⁵

Pada ranah praksisnya, dalam dialog tersebut, tokoh agama dan masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan persoalan yang dialami mereka hal-hal yang berkaitan dengan upaya perwujudan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Usai melakukan dialog MUI Papua bersama FKUB menyampaikan keluhan tersebut pada pemerintah Jayapura dan Provinsi Papua sebagai bahan kebijakan.¹⁶

Penelitian sejarah ini, lahir dari analisis terhadap moderasi agama yang terdapat di Kabupaten Jayapura dari 1993-2010. MUI Papua menjadi objek dalam penelitian ini, MUI Papua sebagai penggerak moderasi beragama yang telah berlangsung sejak 1998, dalam menjalankan moderasi agama di Jayapura MUI Papua melibatkan berbagai kalangan baik dari umat muslim dan non-muslim Jayapura. Keterlibatan masyarakat muslim dan non-muslim menjadi kombinasi yang menarik demi menjadikan Jayapura lebih harmoni dan toleran.

¹⁵ Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, "Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura", *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 206.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 207.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai dinamika MUI Papua di Jayapura dan peranannya dalam membangun kerukunan umat beragama di Jayapura.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini mengkaji tentang peranan MUI Papua dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura. Upaya tersebut digunakan MUI Papua sebagai aksi damai dalam merajut harmoni di Papua, hal tersebut dilakukan agar menghapus trauma masa lalu akibat sikap represif pemerintah dalam menertibkan kedamaian di Papua.

Terdapat alasan mengambil tahun 1993, tahun 1993 merupakan tahun berdirinya MUI Papua di Jayapura. Adapun tahun 2010 merupakan tahun stabilitas kerukunan antar agama, tahun 2010 juga menandai babak baru dalam kondisi sosial-keagamaan di Jayapura, sebab dibawah tahun 2010 masih terdapat banyak kerusuhan dan tingginya sentimen antar agama di Jayapura. Salah satunya ialah demonstrasi kalangan Kristen yang menolak berdirinya STAIN Al Fattah Jayapura hingga 2008.

Adapun fokus penelitian yang akan diulas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dinamika dan kontribusi MUI Papua dalam mengembangkan moderasi beragama di Kabupaten Jayapura, 2. Implikasi dan perubahan sosial-keagamaan masyarakat Jayapura dari perogram moderasi beragama yang

dilakukan MUI Papua di Jayapura, 3. Relasi antara MUI Papua, pemerintah Kabupaten Jayapura dan seluruh organisasi yang terlibat dalam proses moderasi beragama di Kabupaten Jayapura.

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan dan perkembangan keagamaan di Kabupaten Jayapura pra dan pasca konflik 1998?
2. Bagaimana perkembangan dan aktivitas MUI Papua di Jayapura?
3. Mengapa peranan kerukunan umat beragama MUI Papua menimbulkan perubahan dalam sosial keagamaan di Jayapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsi kehidupan dan perkembangan keagamaan di Kabupaten Jayapura pra dan pasca konflik.
2. Menjelaskan perkembangan dan aktivitas MUI Papua di Jayapura.
3. Menganalisis kausalitas perubahan sosial keagamaan di Kabupaten Jayapura terhadap gagasan kerukunan umat beragama MUI Papua.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan wawasan moderasi beragama di Jayapura:

1. Deskripsi gamblang terkait implementasi moderasi beragama di Kabupaten Jayapura, dan bentuk implementasi yang telah dilakukan MUI Papua dalam mengelola moderasi beragama bagi masyarakat Jayapura sehingga menjadikan Jayapura sebagai contoh kota

moderat dan toleran bagi kabupaten dan kota yang lain di Provinsi Papua.

2. Memperoleh gambaran jelas tentang faktor-faktor kausalitas melatarbelakangi sehingga MUI Papua menjadi penyebar moderasi keagamaan di Papua dan menjadikan Papua yang damai dan toleran.
3. Referensi ilmiah dan bahan rujukan tentang sejarah MUI Papua dan dinamika sosial keagamaan di Jayapura.

D. Tinjauan Pustaka

Dinamika sosial keagamaan Papua sangat menarik untuk dikaji, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya literatur baik buku, artikel jurnal, maupun tulisan lepas, dengan ragam penelitian dan pembahasan yang serupa tentang Papua. Namun belum ada karya yang secara khusus membahas MUI dan moderasi beragama di Jayapura. Beberapa hasil penelitian terdahulu dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

Pertama, buku *Jalan Panjang Perdamaian Papua Memahami Sejarah dan Peradaban* 2015 karya Idrus Al Hamid yang diterbitkan The Phinisi Press Yogyakarta.¹⁷ Buku ini mengkaji salah satu sisi penting dari dinamika gejolak yang terjadi di Papua belakangan ini. Pertentangan antara Kristen dan Islam semakin mendapat tempat ketika masyarakat asli Papua terusik. Hal ini disempurnakan dengan adanya upaya isu membawa pendatang ke tengah pusaran perdebatan. Kedatangan transmigrasi Jawa,

¹⁷ Idrus Al Hamid, *Jalan Panjang Perdamaian Papua Memahami Sejarah dan Peradaban* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2015).

imigran Bugis, Makassar, Buton, dan lainnya, telah memberikan warna baru dalam relasi sosial yang terbangun di Papua. Kedatangan mereka juga didukung dengan proyek transmigrasi yang digagas oleh pemerintah, melalui itu mereka menguasai sektor-sektor ekonomi, khususnya tempat-tempat strategis di Jayapura. Meski buku ini cukup banyak menjelaskan sosial keagamaan di Papua secara global, namun sangat terbatas dalam menjelaskan bagaimana tindakan yang MUI Papua lakukan dalam mengelola moderasi keagamaan. Sajian penulisan yang lebih analisis dan komprehensif lebih dibutuhkan untuk membantu penelitian ini. Perbedaan buku tersebut dengan tesis ini, ialah fokus kajian tesis ini tentang peranan MUI Papua dalam mengelola moderasi keagamaan dengan konteks sosial keagamaan yang bersifat koheren dalam rentang waktu Orde Baru hingga reformasi serta dinamisasinya yang beragam dewasa ini.

Kedua, buku yang berjudul *Papua Simpul Jamrud Khatulistiwa 2015* karya Iva Rachmawati,¹⁸ yang diterbitkan Aswaja Pressindo Yogyakarta, buku ini membahas sejarah, politik, Budaya dan potensi pariwisata Papua. Sejurus dengan methapor yang dipakai dalam judul buku ini yaitu “simpul” maka Papua merupakan sebuah guratan penting yang mewarnai sejarah Indonesia. Warna Papua yang lain adalah sebuah fakta yang tidak bisa diubah lagi. Bagian terakhir buku ini berbicara potensi pariwisata Papua yang menjadi simpul penting. Mengapa penting? Karena pariwisata Papua

¹⁸ Iva Rachmawati, *Papua Simpul Jamrud Khatulistiwa* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

menawarkan genre wisata baru yang sedang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir yakni wisata alam dan petualangan. Meski buku ini mengulas Papua dalam beragam sisi tersebut, tetapi buku ini belum mengulas bagaimana moderasi keagamaan yang semakin marak pasca runtuhnya orde baru sehingga dibutuhkan kajian yang lebih intensif. Buku tersebut masih kurang mendalam pembahasannya tentang sosial keagamaan yang terjadi di Jayapura, sedangkan tesis ini berusaha lebih kritis mengkaji dinamika sosial keagamaan dan ragam kejadian sosial yang terjadi di Jayapura, dan langkah-langkah yang telah dilakukan MUI Papua dalam mengelola moderasi keagamaan di Jayapura.

Ketiga, buku *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua* 2009 karya Toni Victor M Wanggai, yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Jakarta. Buku ini menjelaskan sejarah kedatangan Islam di tanah Papua, posisi Islam di masa Belanda, yang sangat terjepit oleh misi Kristenisasi. Kristen mendirikan lembaga pendidikan di pelosok-pelosok tanah Papua, dalam kondisi demikian lahirlah gerakan Islam di Merauke pada 1920 Hizbul Wathan Kepanduan Muhammadiyah. Kemudian Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) tahun 1960 mendirikan sekolah muslim pertama yang bernama *Openbaar Vervlog School Islam*. kepala sekolahnya non-Muslim.¹⁹ Pada tahun 1963 perkembangan Islam di Papua semakin marak dengan banyaknya transmigran dari Jawa dan imigran

¹⁹ Toni Victor M Wanggai, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Jakarta, 2009).

dari Sulawesi memunculkan diaspora komunitas Islam di Papua yang menetap di kota-kota besar Papua seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, dan Nabire, sehingga lambat laun semakin memperbesar gerakan Islam yang ada di sana seperti Muhammadiyah, NU, dan Darul Da'wah wa al-Irsyad, dengan hadirnya mereka juga pendidikan Islam semakin maju hingga 2006 dengan berdirinya STAIN Al-Fattah.

Meski buku ini telah banyak mengulas sejarah Papua secara global, terdapat kekurangan dalam spesifikasi regional dan pengelompokan wilayah yang membahas kondisi sosial dan agama di Papua, Tesis ini hadir untuk menyempurnakan kekurangan tersebut dengan spesifikasi yang jelas, dan pembahasan yang kredibel serta menyajikan data yang komprehensif terkait spesifikasi regional di Jayapura. Adapun perbedaan buku dan tesis ini yakni, lebih menggambarkan sejauh mana langkah dan kontribusi MUI Papua dalam mengelola moderasi beragama di Jayapura sehingga mampu menjadikan Jayapura sebagai wilayah yang moderat dan toleran.

Keempat, buku *Heboh Papua Perang Rahasia Trauma dan Sparatisme* 2010 karya Amiruddin al Rahab.²⁰ Buku ini menjelaskan dimensi sensitif yang disembunyikan dari sistem pemerintahan, pembahasan menyangkut masalah; HAM, gerakan sparatis Papua, orientasi operasi militer, munculnya MRP, politik Jakarta pada Papua, dan berbagai gejolak kemanusiaan yang ada di Papua. Buku ini juga mampu

²⁰ Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua Perang Rahasia Trauma dan Sparatisme* (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2010).

menghadirkan proses dialogis yang terjadi di tanah Papua membahas polemik sosial yang ada, dan alur penggunaan OTSUS bagi masyarakat Papua.

Buku tersebut lebih menjelaskan sisi negatif yang terdapat di Papua sehingga memunculkan stigma negatif Papua bagi pembacanya. Tesis ini hadir untuk melengkapi buku tersebut bahwa tidak semua yang diulas dalam buku benar 100%, terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang diungkap dalam tesis ini seperti persaudaraan sesama muslim, toleransi, dan penguatan moderasi keagamaan. Perbedaan lain, sudut kajian buku tersebut hanya membahas konflik dan politik tanpa menjelaskan solusi dan langkah yang dilakukan, sedangkan tesis ini lebih bersifat analisis dan historis terhadap dinamika sosial keagamaan, konflik, dan langkah penyelesaian, antara lain melalui dialog interaktif dan wawasan moderasi keagamaan melalui MUI .

Kelima, jurnal Agama, Segregasi Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Jayapura Papua 2019 karya Idrus al Hamid.²¹ Jurnal ini menjelaskan pemekaran Papua tarik menarik antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia dengan dalih pembangunan pemberdayaan Papua, munculnya pro dan kontra di Papua pada 2003 disebabkan keengganan orang Papua agar Papua dimekarkan. Gesekan antara pendatang dan orang Papua telah berlangsung lama, namun belakangan ini orang Papua semakin

²¹ Idrus al Hamid, Agama, “Segregasi Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Jayapura Papua”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 1, 2019.

memahami perkembangan global, sehingga mereka siap menghadapi kondisi yang terjadi.

Jurnal tersebut lebih menjelaskan segregasi ekonomi yang terjadi antara orang asli Papua dan pendatang, tulisan ini kurang menyoroti kehidupan keagamaan yang terjadi antara orang Papua dan pendatang serta lebih berfokus pada masalah ekonomi. Tesis ini hadir untuk melengkapi jurnal tersebut sehingga menghadirkan pembacaan yang lebih luas baik dalam konteks sosial, dan agama.

Keenam, jurnal Islam Politik di Papua: Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian 2013 karya Idrus al Hamid jurnal ini merefleksikan hadirnya politik dan budaya Islam di Papua. Munculnya organisasi Islam di Papua menandakan semakin banyaknya pemeluk agama tersebut di Papua, seiring datangnya pendatang muslim maka dibangunlah tempat ibadah dan institusi bagi kaum muslim. Jurnal ini juga membahas dinamika MMP (Majelis Muslim Papua) dan penolakannya pada ormas-ormas Islam yang baru datang di Papua seperti HTI, dan salafi, penolakan tersebut dilatarbelakangi dakwah keras yang di bawa kelompok tersebut bagi masyarakat Papua.²²

Jurnal tersebut menjelaskan kondisi keagamaan di Papua munculnya penolakan terhadap HTI dan salafi dari MMP. Jurnal ini kurang menjelaskan harmoni dan toleransi di Jayapura tesis ini hadir guna

²² Idrus al Hamid, *Islam Politik Di Papua: Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian*, *Jurnal Millah*, Vol. XII, No. 2, 2013.

menyempurnakan jurnal tersebut dengan membahas toleransi dan harmoni di Jayapura.

E. Landasan Teori

Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial, yakni mengkaji peran MUI dalam mengelola keragaman yang ada di Jayapura pasca runtuhnya Orde baru. Secara teoretis sejarah sosial adalah kajian sejarah yang mengulas permasalahan dalam kehidupan masyarakat dilihat berdasarkan bukti-bukti sejarah sosial.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis, melihat permasalahan dari gejala sosial hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial, yang secara keseluruhan mencakup dimensi sosial perilaku manusia.²³ Kemudian untuk menganalisa peran MUI Papua dalam mengelola kerukunan di Kabupaten Jayapura diacu konsep agama menurut Clifford Geertz. Geertz mengistilahkan agama sebagai Sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep-konsep tersebut dengan pancaran faktualitas sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realitas.²⁴

²³ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 1990), hlm. 87.

²⁴ Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 5.

Selain itu penelitian ini menggunakan teori tentang nilai norma dan budaya menurut Franz Magnis Suseno, terdapat dua kaidah dasar yang mempengaruhi pola pergaulan dan hubungan sosial dalam masyarakat sehingga menciptakan kerukunan dan keselarasan, adapun dua kaidah tersebut, yaitu: *Pertama*, Bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan konflik biasa juga disebut dengan kaidah kerukunan. *Kedua*, menuntut agar manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya yang disebut dengan prinsip hormat.²⁵ Dalam penelitian ini nilai norma dan budaya akan dilihat dari keterlibatan MUI Papua dalam membangun kerukunan dan implikasinya dalam perubahan sosial-keagamaan di Jayapura.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode sejarah. Dalam penelitian sejarah terdapat empat tahapan adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.²⁶ Metode sejarah berfungsi sebagai alat penguji dan analisis atas peristiwa masa lampau. Empat langkah metode sejarah dimaksud dilakukan dalam proses penelitian sebagai berikut;

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pengumpulan sumber sejarah, pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 15.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan.²⁷ Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti mencari sumber di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sesuai menemukan sumber peneliti berkonsultasi pada pembimbing penelitian ini. Setelah proposal penelitian ini disetujui pembimbing peneliti berangkat ke Jayapura dengan berbekal surat penelitian dari Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, setelah sampai di Jayapura surat tersebut peneliti serahkan pada MUI Papua dan MUI Jayapura dan diterima dengan baik. Kunjungan ke MUI Papua dan MUI Jayapura peneliti lakukan selama 8 kali, adapun narasumber penelitian seperti Faisal Saleh sekretaris MUI Papua, Makmun Rosyidi ketua MUI Jayapura, Siti Rohmah pengurus MUI Papua sekaligus pengurus Fatayat PWNU Papua, dan pengurus organisasi Islam di Jayapura.

Wawancara tersebut menghasilkan informasi yang penting bagi peneliti. Seperti sejarah dan dinamika MUI Papua di Jayapura, dalam kunjungan lainnya peneliti juga memperoleh informasi perkembangan Islam di Jayapura dan jalannya program pembangunan kerukunan umat beragama di Jayapura. MUI juga melakukan penyuluhan baik kepada kaum muslim maupun non-muslim, peneliti juga memperoleh pinjaman buku

²⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah Teori, Metode, Contoh Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93.

kerukunan umat beragama dari Siti Rohmah pengurus MUI Papua sehingga memudahkan peneliti dalam menuntaskan penelitian ini.

Selain wawancara dan kunjungan peneliti ke MUI Papua, peneliti juga memperoleh informasi kerukunan antar agama dari masyarakat pendatang di Jayapura. Informasi tersebut peneliti gabungkan dengan informasi dari masyarakat non muslim sehingga menjadikan penelitian ini lebih baik.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi atau lazimnya disebut dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber, dalam hal ini yang diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber, yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Kritik ekstern, dilakukan dengan menilai kertas dokumen, siapa penulisnya, dimana ditulisnya dan kapan ditulisnya. Kemudian kritik intern, dilakukan dalam bentuk analisis isi dokumen termasuk membandingkan satu sumber dengan sumber lain digunakan sebagai pembuktian akurasi.²⁸

3. Interpretasi

²⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 105.

Interpretasi merupakan tahap menafsirkan data menjadi fakta, dalam tahap ini terdapat dua metode yang harus digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan, adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan sosiologi dengan menggunakan konsep moderasi beragama. Selain itu digunakan teori perubahan dan interaksi sosial, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dan sintesis sesuai dengan data yang ditemukan.

4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.²⁹ Pada tahap ini, laporan penulisan disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis, diakronik, kausalitas, dan kronologis.

Penyajian penelitian secara garis besar terdiri atas tiga bagian: 1. Pengantar, 2. Hasil penelitian, 3. Simpulan. Setiap bagian terjabarkan dalam bab-bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat, yang penting antara satu bab dengan bab yang lain harus ada pertalian yang jelas.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 113-114.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

Wujud dari penulisan historiografi itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan (eksposisi) yang sampai kepada pembaca atau pemerhati sejarah. Secara bersamaan digunakan tiga teknik dasar penulisan sebagai wahana yaitu; deskripsi, narasi, dan analisis.³¹

Adapun upaya yang dilakukan dalam tahapan historiografi yakni: menuliskan hasil penelitian berupa perkembangan sosial-keagamaan di Jayapura pada akhir abad 20, perkembangan MUI Papua di Jayapura, dan implikasi program moderasi beragama yang telah dilakukan oleh MUI Papua sehingga menimbulkan perubahan dalam sosial keagamaan di Jayapura.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan atas hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini berkedudukan sebagai kerangka atau langkah-langkah penelitian yang memberikan kesimpulan terhadap bab terakhir. Bab

³¹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Ombak: Yogyakarta: 2016), hlm. 185.

ini juga berfungsi memberikan alur penelitian dan mengulas kajian penelitian tesis terhadap bab-bab berikutnya.

Bab kedua adalah pembahasan yang menjelaskan perkembangan sosial-keagamaan di Jayapura pada akhir abad 20 M, yang di dalamnya terdapat sub pembahasan tentang: pemeluk agama-agama di Jayapura, hubungan antar umat beragama, serta relasi antara pemerintah dan pemeluk agama-agama. Bab ini merupakan awal analisis tentang sosial-keagamaan di Jayapura sehingga pembahasan ini mampu menguraikan agama-agama yang terdapat di Kabupaten Jayapura, hubungan harmoni umat beragama, dan keterkaitan antara penguasa dan pemeluk agama-agama.

Bab ketiga merupakan pembahasan yang menjelaskan MUI Jayapura dengan sub-sub pembahasan sebagai berikut: sejarah pembentukan MUI Jayapura, dinamika organisasi MUI Papua di Jayapura, MUI, Pemerintah, dan Masyarakat. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci mengenai sejarah berdiri MUI Jayapura, perkembangannya di Jayapura, dan relasinya antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh baik sesama Islam maupun non-muslim yang mampu menjadi pertimbangan untuk memperoleh konklusi kausal dinamika Islam di Jayapura.

Bab keempat menjelaskan dan menganalisis peranan MUI Jayapura dalam mengelola moderasi keagamaan di Jayapura, yang di dalamnya terdapat; fasilitator pasca konflik 2001, pengembang FKUB 2006, dan mediator kehidupan keagamaan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan

munculnya sikap moderat dalam beragama di Jayapura, yang disebabkan usaha MUI Papua dalam mengkampanyekan sikap moderat dalam beragama, mengurangi konflik agama di Jayapura pasca 2001, dan implikasi moderasi beragama yang dilakukan MUI terhadap perubahan sosial keagamaan di Jayapura.

Bab kelima merupakan penutup atau akhir pembahasan tesis ini, dalam bab ini disampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah generalisasi atas semua pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan kontribusi peneliti yang disampaikan kepada para pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, MUI Papua telah aktif mengkampanyekan dan melakukan training moderasi keagamaan. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang terurai di atas, akhirnya tesis ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Kehidupan pra konflik 1998 di Jayapura masyarakat toleran, tidak adanya sentimen agama dan munculnya simbol-simbol agama Kristen di Jayapura. Kondisi keagamaan cenderung kondusif dan tidak terjadi konflik agama, akan tetapi dalam ranah politik muncul kasus-kasus seperti adanya tuntutan kemerdekaan dari kelompok separatis OPM. Toleransi antar masyarakat tercipta baik sesama masyarakat Papua dan pendatang. Sedangkan pasca 1998 kondisi masyarakat masih terjadi trauma dalam bidang sosial dan agama.

Pasca 1998 muncul kalangan yang menolak munculnya simbol-simbol Islam seperti hijab, bank syariah, STAIN dan lainnya. Toleransi cenderung menurun dibanding pra 1998, dalam kehidupan muncul sentimen yang dilakukan beberapa pemuka agama sehingga menjadikan turunnya kerukunan di Jayapura. Akan tetapi kondisi tersebut cenderung meningkat pada 2010 dengan munculnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menghilangkan rasis terhadap suku, ras, dan agama.

Perkembangan dan aktivitas MUI Papua mulai terlihat pada 1998. MUI Papua telah memberikan sumbangsuhnya dalam membangun toleransi dan kerukunan agama, sepanjang 1998-2010 MUI Papua telah melakukan kerjasama baik pada internal muslim dan non muslim. MUI Papua turut melakukan training kerukunan beragama dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Jayapura dan pengurus masjid-masjid yang ada di Kabupaten Jayapura.

Program kerukunan umat beragama yang dilakukan MUI Papua telah menimbulkan perubahan dalam sosial keagamaan di Jayapura. Secara garis besar terdapat dua faktor yang membentuk perubahan tersebut yaitu: sosial dan agama. Kondisi sosial Jayapura yang beragam turut membentuk sikap masyarakat Jayapura dan menjadikan mereka toleran terhadap perbedaan. Selain faktor sosial agama turut menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Jayapura. Adapun sikap yang muncul seperti persaudaraan yang tulus, dan munculnya nota integritas zona kerukunan umat beragama di Jayapura.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini juga dapat disimpulkan beberapa saran, yakni:

1. Sumber sejarah dalam periode 1980-2010, mengenai MUI Papua dan toleransi beragama di Jayapura kurang memberikan informasi terkait dinamika MUI Papua dan toleransi beragama di Jayapura. terlepas dari kurangnya peneliti yang berminat mengkaji sejarah Papua atau Jayapura secara global dalam rentang waktu tersebut,

hal itu perlu dilakukan usaha untuk mencari sumber-sumber data sejarah yang lebih detail terkait periodisasi tersebut khususnya pasca kolonial Belanda di Papua pada tahun 1969. Utamanya terkait MUI Papua di awal berdirinya hingga 2010, dan harmoni beragama di Jayapura di awal Papua memilih bergabung ke Indonesia hingga 2010.

2. Minimnya data diaspora umat Islam Jawa, dan Makassar dalam membangun peradaban di Jayapura, perlu dihadirkan dalam melakukan interpretasi sejarah dalam kepenulisan sejarah kehidupan umat Islam di Jayapura. Terkait kondisi sosial di Jayapura, perlu ditekankan bahwa tanpa adanya campur tangan umat muslim Jayapura tidak maju, demikian peneliti rasa penting untuk menyempurnakan kekurangan tersebut dalam penelitian MUI dan toleransi beragama di Jayapura atau Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Dudung *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Elisabeth, Adriana, Muridan S Widjojo, Cahyo Pamungkas, dkk. *Agenda Dan Potensi Damai di Papua*. Jakarta: LIPI, 2005.
- Geertz, Clifford. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Idrus Al. *Jalan Panjang Perdamaian Papua Memahami Sejarah dan Peradaban*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 1990.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Mashad, Dhurorudin. *Muslim Papua Membangun Harmoni Berdasar Sejarah Agama di Bumi Cenderawasih*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2020.
- Majid, Dien, dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana: 2014.
- Pekey, Frans. *Papua Mencari Jalan Perdamaian Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Rachmawati, Iva. *Papua Simpul Jamrud Khatulistiwa*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Rahab, Amiruddin al. *Heboh Papua Perang Rahasia Trauma dan Sparatisme*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Siswanto, Eko Potret Kerukunan Antar Umat Beragama Indikator Sukses Pemerintah Kota Jayapura dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- S, I Wayan Rai. *Merajut Kerukunan Di Jayapura Diaspora Ethnis Bali Penyungsurung Pura Agung Surya Bhuvana*. Mimika Baru: Aseni dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, 2020.

- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Soebagio, Moch. *Mengenal Sebagian dari Tanah Air Kita Irian Barat*. Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi, 1962.
- Sufyanto. Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Wanggai, Toni Victor M. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

Arsip

- Badan Pusat Statistika Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1998. Jayapura: BPS Provinsi Irian Jaya, 1998.
- Badan Statistik Provinsi Papua, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kotadan Agama yang Dianut di Provinsi Papua (jiwa) 2020”, [https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua .html](https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html), diakses pada 02 Juli 2022.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, “Profil Keadaan Geografi dan Lingkungan Jayapura,” <https://dinkes.jayapurakab.go.id/profil/>, diakses pada 30 Juni 2022.
- Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Gallery Kenambai Umbai Tokoh Agama dan Tokoh Adat Harus Bisa Menjaga Kerukunan, Majalah Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Edisi Jan-Juli 2018.
- _____, *Gallery Kenambai Umbai Kepala Daerah Inovatif*, Majalah Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Edisi Jan-Juli 2017.
- Makmun Rosyidi, *Kiat Membangun Moderasi Beragama Dalam Pandangan Islam*. Jayapura: Pelatihan Training Sekolah Minggu Kristen Jayapura, 2010.
- Pemerintah Kabupaten Jayapura, “Budaya di Jayapura”, <https://jayapurakab.go.id/pemerintahan/sejarah/budaya>, diakses pada 16 Agustus 2022.

Pemerintah Provinsi Papua, “Pdt. Herman Saud Ketua Terpilih Pengurus FKUB”, <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-1293/undefined>, Diakses pada 14 Agustus 2022.

_____, “Ciptakan Kerukunan Yang Lebih Kondusif, <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-1862/undefined>, diakses pada 14 Agustus 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Majelis Ulama Indonesia.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Tentang Pengukuhan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Masa Khidmat 2020-2025.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua, Nomor: Kep-004/DP-PAPUA/MUI/VII/2018.

Wawancara

Faisal Saleh, Sekretaris MUI Papua dan Mantan Ketua MUI Kabupaten Jayapura, Wawancara, 9 Agustus 2022, 09.30 WIT.

Harjuni Serang, Anggota MUI Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua, Wawancara, 08 Agustus 2022, 13.00 WIT.

Makmun Rosyidi, Ketua MUI Kabupaten Jayapura dan anggota MUI Provinsi Papua, Wawancara, 8 Agustus 2022, 13.00 WIT.

Nur Khayat, Masyarakat Transmigran di Kabupaten Jayapura, Wawancara, 4 Agustus 2022, 7.30 WIT.

Selamet Wiyono, Masyarakat Transmigran di Kabupaten Jayapura 06 Agustus 2022, 16.00 WIT.

Siti Rohmah, Anggota MUI Papua, 11 September 2022, 13.30 WIT.

Suyadi, Masyarakat Transmigran di Kabupaten Jayapura 4 Agustus 2022, 08.00 WIT.

Syaiful Anwar, Masyarakat Transmigran di Kabupaten Jayapura, 5 Agustus 2022, 13.00 WIT.

Tumin, Masyarakat Transmigran di Kabupaten Jayapura 05 Agustus 2022, 08.20 WIT.

Umar Bauw al-Bintuni, Anggota MUI Papua, Wawancara, 10 September 2022, 17.12 WIT.

Waicang, Masyarakat Asli Kabupaten Jayapura, 12 Agustus 2022, 16.10 WIT.

Jurnal

Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura”, *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Dute, Hasrudin, “Pendidikan Toleransi Hidup Beragama di Yapis Papua, *Jurnal IQ Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Elisabeth Lenny Marti, dan Hugo Warami, “Wacana Papua Tanah Damai Dalam Bingkas Otonomi Khusus Papua”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 1, 2018.

Hamid, Idrus Al. “Islam, Local “Strongmen”, And Multi-track Diplomacies In Building Religious Harmony In Papua”. *JIIS (Journal Of Indonesian Islam)*, Vol. 14, No. 1, 2020.

_____, “Islam Politik di Papua Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian”. *Jurnal Millah*, Vol. 12, No. 2, 2013.

Iribaram, Suparto, Irwan Abdullah, dan Ulung Pribadi, “Diskriminasi Muslim dalam Birokrasi Studi Pada Pemerintahan Kota Jayapura”. *Jurnal al-Ulum*, Vol. 18, No. 1, 2018.

Pamungkas, Cahyo “Muslim Papua Dan Muslim Pendatang Pertarungan Identitas Antara Ke-Indonesiaan-an dan Ke-Papua-an”. *Jurnal Kawistara*, Vol. 6, No. 3, 2016.

Qodir, Zuly “Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura”. *Jurnal Harmoni*, Vol. 14, No. 1, 2015.

Sabara, dan Elce Yohana Kodina, “Kerukunan Umat Beragama Dalam Pikiran Dan Praktik Kelompok Keagamaan Islam Di Jayapura”. *Jurnal Harmoni*, Vol. 19, No. 2.

Yusuf, Muhammad, Sahudi, Marwan Sileuw, Linda Safitri, “Menata Kontestasi Keagamaan Di Ruang Publik Kota Jayapura”. *Jurnal Religious*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Website

- Admin Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Provinsi Papua, “LDII Jayapura Tekankan Pembangunan Berkearifan Lokal”, <https://ldii.or.id/ldii-jayapura-tekanan-pembangunan-berkearifan-lokal/> , diakses pada 12 Agustus 2022.
- Admin Kilas Papua, “FKUB Papua Apresiasi Silaturahmi Kebangsaan TNI/Polri, Lipius Biniluk Harapkan Ini Terus Berlanjut Sebab Papua Tanpa Komunikasi Sulit”, <https://kilaspapua.com/daerah/fkub-papua-apresiasi-silaturahmi-kebangsaan-tni-polri-lipius-biniluk-harapkan-ini-terus-berlanjut-sebab-papua-tanpa-komunikasi-sulit/>, diakses pada 14 Agustus 2022.
- Admin Web Papua, “Papua Tolak FPI dan HTI”, <http://papua.go.id/view-detail-berita-4426/papua-tolak-fpi-dan-hti.html>, diakses pada 15 Agustus 2022.
- Angga, Sadam Al-Ghifary.” MUI Papua Garda Terdepan Satukan Ukhuwah Basyariah dan Wathoniah”, <https://mui.or.id/berita/31880/mui-papua-garda-terdepan-satuan-ukhuwah-basyariah-dan-ukhuwah-wathoniah/>, diakses pada 12 April 2022.
- Ardanawati, Indira “Sejarah Transmigrasi Orang Jawa Ke Papua”, <https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs>, diakses pada 17 Juni 2022.
- Banjir Ambarita, “Hut OPM Warga Papua Padati Makam Theys Eluay”, <http://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/nasional/268718-hut-opm-warga-papua-padati-makam-theys-eluay>, diakses pada 14 Agustus 2022.
- Editor Republika, “Fatwa MUI Tentang Muslim Memakai Atribut Natal”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pk6s88414>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- Editor CNN, “Mahasiswa Papua Surabaya Peringati Setahun Rasisme Monyet” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818121144-20-536793/mahasiswa-papua-surabaya-peringati-setahun-rasisme-monyet>, diakses pada 08 September 2022.
- Eko Priliawito, dan Fajar Ginanjar Mukti, “Ini Menara Masjid al-Aqsha Sentani yang dituntut dibongkar”, <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1017419-ini-menara-masjid-al-aqsha-sentani-yang-dituntut-dibongkar>, diakses pada 15 Agustus 2022.
- Firdayanti, Nurilah, “Papua Menjadi Korban Rasisme dan Diskriminasi di Negeranya Sendiri”, <https://www.kompasiana.com/nurilahf/61d52e234b660d58ee6a1a52/papua-menjadi-korban-rasisme-dan-diskriminasi-di-negeranya-sendiri>, diakses pada 08 September 2022.

Liza Indriyani, “FKUB Deradikalisasi Tolak Radikalisme di Tanah Papua”, <https://kabarpapua.co/fkub-deklarsi-tolak-radikalisme-di-tanah-papua/>, diakses pada 13 Agustus 2022.

Muhyiddin, dan Fuji E Permana, “Soal Tuntutan Pembongkaran Menara Masjid, Ini Kata Menag”, <https://www.republika.co.id/berita/p5rozu396/soal-tuntutan-pembongkaran-menara-masjid-ini-kata-menag>, diakses pada 21 Juli 2022.

Ramadhani, Dani, “Zona Integritas Kerukunan Terbit di Jayapura”, <https://www.quotidiano.com/post/zona-integritas-kerukunan-terbit-di-jayapura>, diakses pada 20 Juli 2022.

Rolando, “MUI Papua: Stop Pakai Istilah Orang Asli Papua dan Pendatang”, <https://newa.detik.com/berita/d-4731025/mui-papua-setop-pakai-istilah-orang-asli-papua-dan-pendatang>, diakses pada 13 Agustus 2022.

Subarkah, Muhammad, “MUI Papua Apresiasi Permohonan Maaf Ustaz Fadlan”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6legf385>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Suryawan, I Ngurah, “Kemana Jalan Damai Papua”, <https://suarapapua.com/2020/03/07/kemana-jalan-damai-papua/>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Syakur, Muhammad Abdus, “MUI: Hubungan Antar Umat Beragama di Papua Kondusif”, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/04/04/139671/mui-hubungan-antar-umat-beragama-di-papua-kondusif.html>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Team Human Rights Watch, “Masalah Kekerasan di Irian Jaya”, <https://www.hrw.org/id/news/1998/07/07/247181>, diakses pada 12 Agustus 2022.

Team Tempo, “Kasus Penyanderaan WNI di Papua Terjadi Sejak 1980-an”, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/700894/kasus-penyanderaan-wni-di-papua-terjadi-sejak-1980-an>, diakses pada 17 Juni 2022.

TH, Indrayadi, “MUI Papua Kecam Keras Tindakan SDN Entrop Karena Keluarkan Murid Berjilbab”, <https://jubi.co.id/mui-papua-kecam-keras-tindakan-sdn-entrop-karena-keluarkan-murid-berjilbab/amp/>, diakses pada 17 Agustus 2022.